

# **PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN BELANJA MODAL TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

**Anggatie Ariza**

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Pontianak

Email: anggatie\_ariza@yahoo.co.id

## **Abstract**

Prosperity is the ultimate goal of every nation or region that can be achieved through economic development. One of its indicators is Human Development Index (HDI) of the region. This research is aimed at identifying the effect of economic development and capital expenditure towards HDI. The data used in the research were panel data gained from fourteen cities/regencies in West Kalimantan in 2008 to 2012. The data were analysed by means of fixed effect method. The findings show that economic development and capital expenditure positively and significantly affect human development index.

**Key Words:** Economic Development, Capital Expenditure, Human Development Index, Islamic Perspective

## **Abstrak**

Kesejahteraan penduduk merupakan tujuan setiap daerah yang dapat tercapai dengan pembangunan ekonomi. Salah satu indikatornya adalah indeks pembangunan manusia (IPM). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pertumbuhan ekonomi dan belanja modal terhadap IPM. Data yang digunakan merupakan data panel yaitu data 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat selama tahun 2008-2012 dan alat analisis metode Efek Tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

**Kata Kunci:** Pertumbuhan ekonomi, Belanja modal, IPM

## **Pendahuluan**

Setiap daerah mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Menurut Al-Ghazali,<sup>1</sup> kesejahteraan manusia terletak pada perlindungan keimanan (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*aqal*), keturunan (*nasb*) dan kekayaan (*māl*). Islam mengajarkan untuk tidak meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah baik secara ekonomi, agama, ilmu maupun pertahanan, seperti yang terkandung dalam Qs. an-Nisā (4): 9 berikut ini:

---

<sup>1</sup> Chapra dalam Nurul Huda dkk, *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, Edisi Pertama, Cetakan ke-1 (Jakarta: Kencana, 2012), 1.

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا  
قَوْلًا سَدِيدًا) ٩ )

Artinya:

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.<sup>2</sup>

Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan adalah dengan pembangunan ekonomi, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan segenap lapisan masyarakat untuk mencapai kehidupan lebih baik. Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui pembangunan ekonomi yang mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk, yaitu kesehatan, tingkat pendidikan dan indikator ekonomi.

Menurut Fhino dan Priyo, ketiga unsur tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Selain juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja, yang pada gilirannya ditentukan oleh banyak faktor, terutama pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan kebijakan pemerintah.<sup>3</sup>

Pertumbuhan ekonomi sangat penting karena pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan output per kapita yang menunjukkan pertumbuhan upah riil dan meningkatnya standar hidup.<sup>4</sup> Peran pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai katalisator dan fasilitator. Melalui anggaran belanja, pengeluaran pemerintah sebagian digunakan untuk kegiatan pembangunan di berbagai jenis infrastuktur yang penting.<sup>5</sup>

Semakin tinggi IPM maka semakin tinggi pula kesejahteraan penduduknya. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kesejahteraan dari sisi kesehatan dilihat pada angka harapan hidup, dari sisi pendidikan dilihat pada angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, dari sisi ekonomi dilihat pada pengeluaran per kapita riil. IPM provinsi–provinsi di Pulau Kalimantan ditunjukkan pada gambar berikut:

---

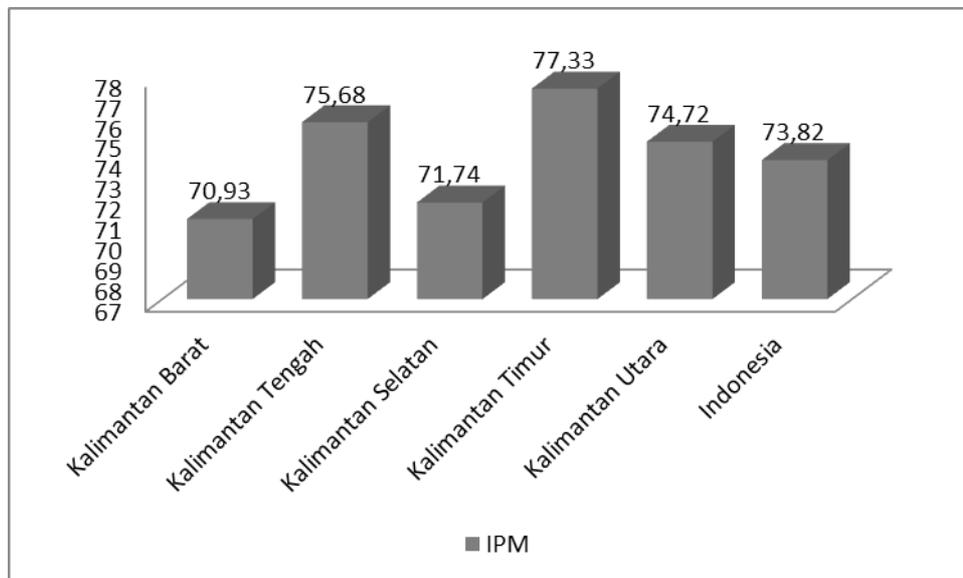
<sup>2</sup> Q.S. an-Nisā (4) : 9.

<sup>3</sup> Fhino Andrea Christy dan Priyo Hari Adi, *Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia* (The 3rd National Conference UKWMS 2009), 2.

<sup>4</sup> Paul A Samuelson dan William D. Nordhaus. *Makroekonomi*. Edisi 14. (t.tp: Erlangga, 1992), 257.

<sup>5</sup> Purbayu Budi Santoso dan Retno Puji Rahayu, *Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri, Dinamika Pembangunan*, Vol.2, No.1, 9-18. 2005, 13.

## INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) PROVINSI-PROVINSI DI PULAU KALIMANTAN DAN INDONESIA PADA TAHUN 2013



Sumber: BPS

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2013 dilihat dari indikator IPM, Provinsi Kalimantan Barat dengan nilai IPM sebesar 70,93 masih tertinggal dibandingkan provinsi lainnya di Pulau Kalimantan, secara nasional Provinsi Kalimantan Barat menduduki peringkat ke 29. IPM Provinsi Kalimantan Barat juga berada di bawah IPM Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan provinsi terbaru di Pulau Kalimantan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji pengaruh pertumbuhan ekonomi dan belanja modal terhadap IPM pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat

### **Bentuk Penelitian**

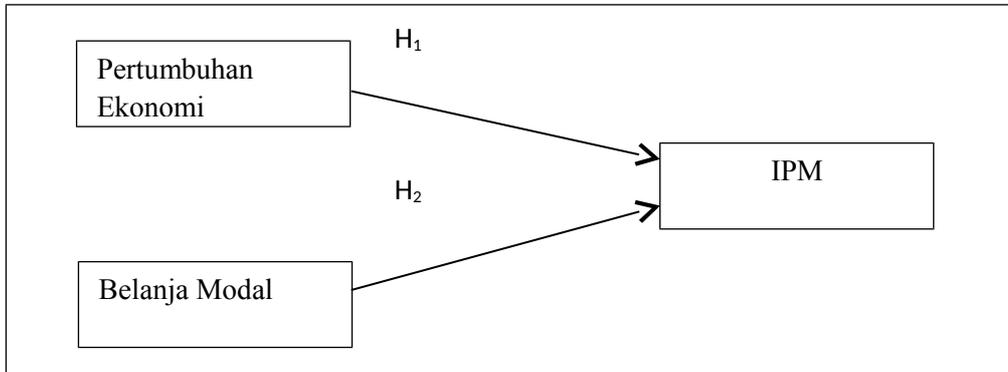
Bentuk penelitian yang digunakan adalah bentuk penelitian eksplanatoris. Penelitian eksplanatoris dilakukan dengan cara menjelaskan gejala yang ditimbulkan oleh suatu objek penelitian dimana peneliti berusaha mencari jawaban terhadap fenomena suatu permasalahan yang diajukan.<sup>6</sup> Penelitian eksplanatoris juga dapat disebut dengan penelitian kausal komparatif bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan sebab akibat dengan cara berdasarkan atas pengamatan akibat yang ada, mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu. Dalam penelitian

---

<sup>6</sup> Ibnu Subiyanto, *Metodologi Penelitian*, Edisi Ketiga, Cetakan Kedua (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2000), 4.

ini, yang ingin dijelaskan adalah mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi dan belanja modal terhadap IPM.

### **Kerangka Konseptual**



### **Hipotesis**

- H<sub>1</sub> : Pertumbuhan berpengaruh secara signifikan terhadap IPM
- H<sub>2</sub> : Belanja modal berpengaruh secara signifikan terhadap IPM

### **Sumber dan Jenis Data**

Data yang diteliti merupakan data sekunder, yaitu data APBD kabupaten/kota se-Kalimantan Barat, data PDRB kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Barat dan data IPM kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Barat yang diperoleh dari BPS Provinsi Kalimantan Barat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yaitu gabungan data *cross section* ( 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat) dengan *time series* (tahun 2008 sampai tahun 2012) sehingga tersedia 70 data yang dapat diobservasi dalam penelitian ini.

### **Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas:obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>7</sup> Populasi dapat dibedakan menjadi populasi terbatas dan populasi tidak terbatas. Populasi dalam penelitian ini merupakan populasi terbatas yaitu seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat, karena ukuran populasi penelitian relatif tidak besar, maka seluruh unsur populasi digunakan

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan ke-14 (Bandung: Alfabeta, 2009), 115.

sebagai sumber data (responden) yang disebut sensus atau total sampling. Pengamatan dalam penelitian ini meliputi seluruh kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Barat.

### **Alat Analisis**

Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan dan belanja modal terhadap IPM digunakan analisis regresi berganda (*Multiple Regression Analysis*) dengan menggunakan program Eviews 7.

Dengan demikian spesifikasi model menjadi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e_{it}$$

Ket : Y = IPM

X<sub>1</sub> = pertumbuhan ekonomi

X<sub>2</sub> = belanja modal

Untuk mengestimasi parameter model dengan data panel, terdapat beberapa teknik yang ditawarkan, yaitu:<sup>8</sup>

1. *Ordinary Least Square (OLS)*
2. Model Efek Tetap (*Fixed Effect*)
3. Model Efek Random (*Random Effect*)

### **Pengujian Model**

Untuk memilih model yang tepat, Natchrowi dan Hardius menyarankan beberapa uji yang perlu dilakukan, yaitu menggunakan Uji Signifikansi *Fixed Effect* (Uji F) dan uji Hausman.<sup>9</sup> Widarjono menambahkan uji Lagrange Multiplier (LM) untuk memilih model.<sup>10</sup>

1. Uji Signifikansi *Fixed Effect* (Uji F) digunakan untuk memilih model efek tetap (MET) atau model OLS.
2. Uji Hausman digunakan untuk memilih model efek tetap (MET) atau model efek random (MER).

---

<sup>8</sup> Noachrowi D Nachrowi dan Hardius Usman, *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), 311.

<sup>9</sup> Noachrowi D Nachrowi dan Hardius Usman, *Pendekatan...*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006)

<sup>10</sup> Agus Widarjono, *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*, Edisi Ketiga, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Ekonisia, 2009)

3. Uji Lagrange Multiplier (LM) digunakan untuk memilih model Random Effect (MER) atau model OLS.

### **Pengujian Kriteria Statistik**

Pengujian kriteria statistik melibatkan ukuran kesesuaian model yang digunakan (*goodness of fit*) dan uji signifikansi, baik pengujian secara parsial (uji t) maupun pengujian secara simultan (uji F).

1. *Koefisien Determinasi* ( $R^2$ )

Koefisien determinasi adalah suatu ukuran yang menjelaskan besar variasi variabel terikat (*dependen*) dapat diterangkan oleh variabel bebas (*independen*). Jika  $R^2 = 0$  maka variasi dari variabel terikat tidak dapat diterangkan variabel bebas sama sekali, jika  $R^2 = 1$  maka variasi variabel terikat secara keseluruhan dapat diterangkan oleh variabel bebas, dengan kata lain jika  $R^2 = 1$  maka semua titik pengamatan berada tepat pada garis regresi.

2. Uji F *atau* pengujian secara simultan

Uji F dipakai untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen secara keseluruhan atau simultan terhadap variabel dependen. Pada tingkat signifikansi 5 persen dengan kriteria pengujian yang digunakan adalah :

- Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak apabila, yang artinya variabel independent secara serentak atau bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependent secara signifikan.
- Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, yang artinya variabel independent secara serentak atau bersama-sama mempengaruhi variabel dependent secara signifikan.

3. Uji t *atau* pengujian secara parsial

Uji t dipakai untuk melihat signifikansi pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lain bersifat konstan. Pada tingkat signifikansi 5 persen dengan kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut :

- Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, yang artinya salah satu variabel bebas (*independent*) tidak mempengaruhi variabel terikat (*dependent*) secara signifikan.

- Jika  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, yang artinya salah satu variabel bebas (*independent*) mempengaruhi variabel terikat (*dependent*) secara signifikan.

### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian Pratowo (t.th) tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia menemukan hasil bahwa belanja daerah dan proporsi pengeluaran non makan berpengaruh positif signifikan terhadap IPM sedangkan Gini rasio dan rasio ketergantungan berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM. Sumiyati (t.th) menemukan bahwa belanja modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IPM namun menunjukkan arah yang positif.

Christy dan Priyo (2009) menemukan bahwa besarnya belanja modal sangat ditentukan oleh Dana Alokasi Umum (DAU) dan belanja modal berpengaruh terhadap IPM. Mirza (2012) menemukan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM sedangkan pertumbuhan ekonomi dan belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap IPM.

Hendarmin (2012) menemukan bahwa belanja modal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan sedangkan investasi swasta berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja modal berpengaruh positif signifikan sedangkan investasi swasta berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kesempatan kerja. Belanja modal dan investasi swasta melalui pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Belanja modal dan pertumbuhan ekonomi melalui kesempatan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi dari sudut tinjauan ekonomi dapat direfleksikan oleh pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. PDRB merupakan penjumlahan dari semua barang dan jasa akhir mencakup semua nilai tambah yang dihasilkan oleh daerah dalam periode satu tahun. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan perkembangan perekonomian dalam suatu daerah.

Soegiarto dan Mardiyono mengartikan pembangunan ekonomi sebagai peningkatan pendapatan nasional tanpa dibarengi perubahan-perubahan kelembagaan/institusi. Ada dua faktor sebagai syarat terjadinya pertumbuhan ekonomi, yaitu faktor utama yang meliputi sumber/sumber ekonomi/faktor-faktor produksi dan faktor penunjuang yang meliputi stabilitas politik dan keamanan, perkembangan ekonomi dunia dan lembaga-lembaga ekonomi.<sup>11</sup> Pertumbuhan ekonomi menurut Subandi adalah kenaikan GDP/GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk atau apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau tidak.<sup>12</sup>

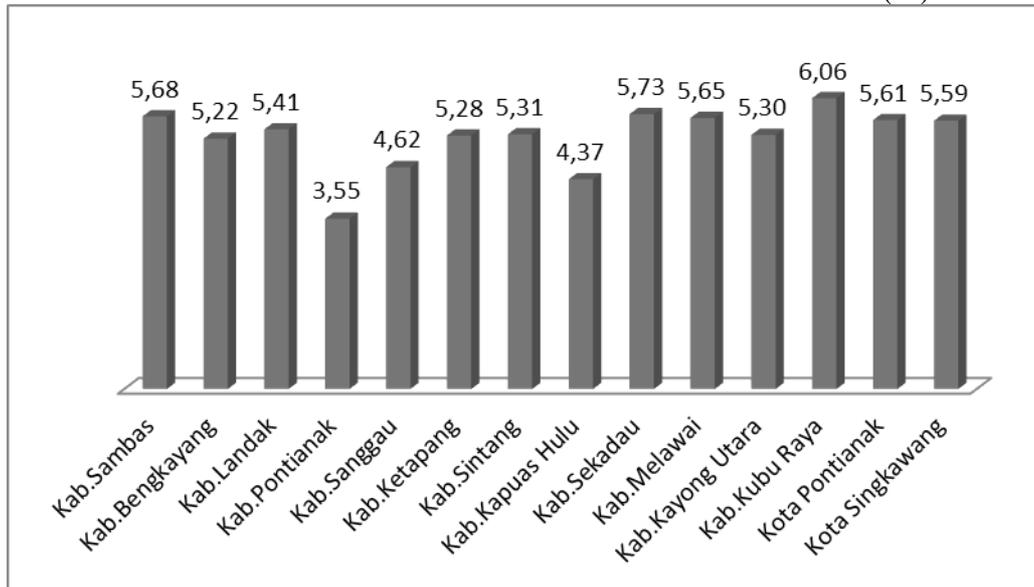
Rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun 2008-20 yang tertinggi terdapat pada Kabupaten Kubu Raya sebesar 6,06% sedangkan yang terendah terdapat pada Kabupaten Pontianak sebesar 3,55%. Pada tahun 2007, Kabupaten Pontianak (8.262,10 km<sup>2</sup>) mengalami pemekaran menjadi Kabupaten Pontianak (1276,90 km<sup>2</sup>) dan Kabupaten Kubu Raya (6.985,20 km<sup>2</sup>). Luas wilayah yang lebih besar dari kabupaten induk serta keberadaan sektor-sektor perekonomian yang produktif seperti sektor sekunder dan sektor tersier menyebabkan tingginya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kubu Raya. Pertumbuhan ekonomi yang rendah di Kabupaten Pontianak dapat disebabkan oleh luas wilayah yang semakin kecil serta kurangnya sektor-sektor ekonomi yang produktif. Rata-rata pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada gambar berikut:

---

<sup>11</sup> Eddy Soegiarto dan Mardiyono. *Pengantar Teori Ekonomi: Ekonomi Mikro Ekonomi Makro*, Cetakan Pertama (Tangerang Selatan:Mahkota Ilmu, 2011), 110.

<sup>12</sup> Subandi. *Ekonomi Pembangunan*, Cetakan Ketiga. (Bandung:Alfabeta, 2014), 15.

RATA-RATA PERTUMBUHAN EKONOMI PADA KABUPATEN/KOTA DI  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2008-2012 (%)



Sumber: BPS

### Belanja Modal

Untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat diperlukan peran pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu peran pemerintah adalah melalui kebijakan fiskal yakni suatu usaha pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Anggaran penerimaan dan pengeluaran sudah dikenal sejak zaman Rasulullah saw hingga zaman pertengahan. Tujuan pembelanjaan pemerintah dalam Islam dalam Nurul Huda dkk adalah sebagai pengeluaran demi memenuhi kebutuhan hajat masyarakat, alat redistribusi kekayaan, meningkatkan permintaan yang efektif, berkaitan dengan investasi dan produksi, serta menekan tingkat inflasi dengan kebijakan intervensi pasar.<sup>13</sup> Pembelanjaan utama yang harus dikelola pemerintah menurut Ibnu Taimiyah dalam Nurul Huda dkk adalah untuk kaum miskin dan yang membutuhkan, pemeliharaan tentara untuk jihad dan pertahanan, pemeliharaan ketertiban dan hukum internal, pensiun dan gaji pegawai, pendidikan, infrastruktur serta kesejahteraan umum.

14

<sup>13</sup> Nurul Huda dkk, *Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, Edisi Pertama, Cetakan ke 1 (Jakarta: Kencana, 2012), 189.

<sup>14</sup> *Ibid*, 191.

Struktur belanja daerah pada saat ini terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja modal adalah salah satu unsur dari belanja langsung, yaitu belanja yang dipengaruhi oleh adanya program atau kegiatan. Belanja modal menurut Fhino dan Priyo dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.<sup>15</sup> Halim mengemukakan bahwa definisi belanja modal mempunyai kesamaan dimensi dengan definisi belanja pembangunan.<sup>16</sup> Belanja pembangunan diartikan sebagai pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan menambah aset atau kekayaan bagi daerah yang selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya.

Menurut Rostow dan Musgrave model belanja modal pemerintah adalah:<sup>17</sup>

- a. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi adalah besar, karena pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, transportasi.
- b. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar.
- c. Pada tingkat ekonomi lebih lanjut dalam pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya.

Rata-rata belanja modal tahun 2008-2012 yang tertinggi terdapat pada Kota Pontianak sebesar Rp 60.627.069.529 sedangkan yang terendah terdapat pada Kabupaten Kayong Utara sebesar Rp 121.410.247. Rata-rata belanja modal yang tinggi pada Kota Pontianak disebabkan karena Kota Pontianak merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Barat sehingga memerlukan dana belanja yang cukup besar untuk mendukung kegiatan perekonomiannya. Kabupaten Kayong Utara merupakan pemekaran dari Kabupaten Ketapang pada pertengahan 2007, sehingga pada tahun 2008

---

<sup>15</sup> Fhino Andrea Christy dan Priyo Hari Adi, "Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia", *The 3rd National Conference UKWMS* (t.tp, 2009).

<sup>16</sup> Halim (2002) dalam Euis Eti Sumiyati, *Pengaruh Belanja Modal Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Propinsi Jawa Barat* (Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Achmad Yani, t.th), 9.

<sup>17</sup> Dalam Hendarmin, "Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat", *Jurnal EKSOS*, Volume 8, Nomor 3 Oktober 201, 144-145.

belanja pemerintah tidak terlalu besar karena belum efektif secara administratif, hal inilah yang menyebabkan rata-rata belanja modal di Kabupaten Kayong Utara menjadi rendah. Rata-rata belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

RATA-RATA BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT SELAMA TAHUN 2008-2012

Kabupaten/Kota	Rata-Rata Belanja Modal
Kab.Sambas	Rp 141.726.789
Kab.Bengkayang	Rp 126.621.951
Kab.Landak	Rp 190.415.554
Kab.Pontianak	Rp 131.305.457
Kab.Sanggau	Rp 146.582.975
Kab.Ketapang	Rp 289.745.846
Kab.Sintang	Rp 149.193.719
Kab.Kapuas Hulu	Rp 239.572.529
Kab.Sekadau	Rp 123.257.912
Kab.Melawai	Rp 156.154.910
Kab.Kayong Utara	Rp 121.410.247
Kab.Kubu Raya	Rp 135.467.696
Kota Pontianak	Rp 60.627.069.529
Kota Singkawang	Rp 23.345.809.086

Sumber: BPS

### Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. IPM mencoba memberikan peringkat kepada negara atau daerah berdasarkan atas 3 tujuan atau produk pembangunan yaitu:<sup>18</sup>

- Usia panjang yang diukur dengan tingkat harapan hidup
- Pengetahuan yang diukur dengan rata-rata tertimbang dari jumlah orang dewasa yang dapat membaca dan rata-rata tahun sekolah
- Penghasilan yang diukur dengan pendapatan perkapita riil yang telah disesuaikan, yaitu disesuaikan menurut daya beli mata uang masing-masing negara dan asumsi menurunnya utilitas marginal penghasilan dengan cepat.

Terdapat 3 golongan status pembangunan manusia berdasarkan nilai IPM yaitu:<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Subandi, *Ekonomi...*,39-40.

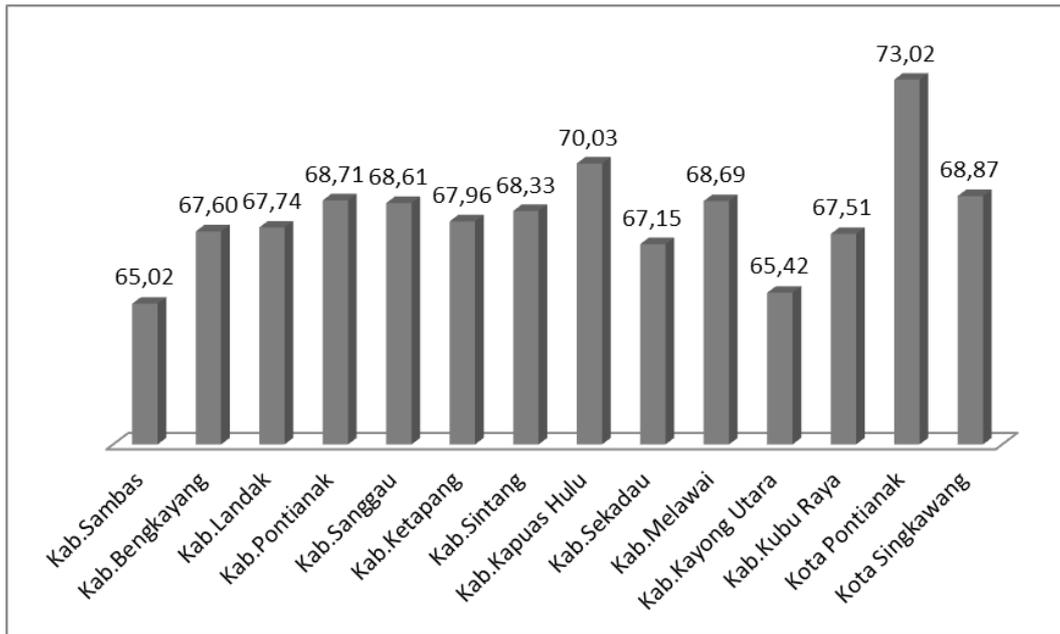
<sup>19</sup> UNDP (1990), lihat juga dalam Nur Isa Pratowo,"Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia", *Jurnal Studi Ekonomi Indonesia* Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret (Surakarta, t.th),16.

1.  $IPM < 50$                       rendah
2.  $50 \leq IPM < 80$                 sedang/menengah
3.  $IPM \geq 80$                       tinggi

Jika status IPM masih berada pada kriteria rendah maka menunjukkan bahwa daerah tersebut masih memerlukan perhatian khusus untuk mengejar ketinggalan kinerja pembangunan manusianya. Jika status IPM berada pada kriteria menengah maka pembangunan manusianya masih perlu ditingkatkan. Jika status IPM sudah berada pada kriteria tinggi maka kualitas pembangunan manusianya harus dipertahankan agar menjadi lebih baik.

Rata-rata IPM tahun 2008-2012 yang tertinggi terdapat pada Kota Pontianak sebesar 73,02 sedangkan yang terendah terdapat pada Kabupaten Sambas sebesar 65,02. Berdasarkan kriteria oleh UNDP maka IPM pada kabupaten/kota di Kalimantan Barat masih terletak pada kriteria menengah sehingga diperlukan usaha untuk meningkatkan pembangunan manusia terutama di bidang pendidikan, kesehatan maupun pendapatan. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:

#### RATA-RATA IPM PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT SELAMA TAHUN 2008-2012



Sumber: BPS

## Pengujian Statistik

Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) digunakan analisis regresi berganda. Langkah-langkah yang dilakukan adalah pengujian model, pengujian asumsi klasik dan pengujian kriteria statistik.

### 1. Pengujian Model

Ada 3 teknik analisis yang dapat digunakan untuk data panel, yaitu *ordinary least square* (OLS), *fixed effect model* (MET), dan *random effect model* (MER). Untuk memilih model yang tepat dari ketiga teknik analisis tersebut, maka perlu dilakukan Uji F yang membandingkan antara model OLS dengan MET, sedangkan untuk memilih antara MET atau MER dapat dilihat dari uji Hausman.

Pengujian signifikansi (uji F) digunakan sebagai uji formalitas untuk membandingkan antara OLS dengan MET, namun secara teori tidak realistis jika semua kabupaten/kota memiliki intersep yang sama sehingga model OLS tidak cocok untuk digunakan. Untuk lebih jelasnya dilakukan pengujian uji F dengan kaidah keputusan sebagai berikut:

$H_0$  : *Ordinary Least Square* (OLS)

$H_a$  : *Fixed Effect Model* (MET)

Berdasarkan hasil analisis dapat dilihat bahwa nilai uji F sebesar 32,13 dengan probabilitas sebesar 0,000 atau lebih kecil dari  $\alpha=5\%$ , sehingga kita menolak  $H_0$  dan menyimpulkan bahwa MET sebagai teknik analisis yang lebih sesuai. Hasil uji F disajikan secara lengkap dalam tabel berikut:

Redundant Fixed Effects Tests			
Pool: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	32.133979	(13,54)	0.0000

Sumber: BPS (data olahan eviews 7)

Uji Hausman digunakan sebagai uji formalitas untuk membandingkan antara MER dengan MET. Untuk lebih jelasnya dilakukan pengujian uji Hausman dengan kaidah keputusan sebagai berikut:

$H_0$  : *Random Effect Model* (MER)

$H_a$  : *Fixed Effect Model* (MET)

Berdasarkan hasil analisis dapat dilihat bahwa nilai Chi Square sebesar 20,57 dengan probabilitas sebesar 0,000 atau lebih kecil dari  $\alpha=5\%$ , sehingga kita menolak  $H_0$  dan menyimpulkan bahwa MET sebagai teknik analisis yang lebih sesuai. Hasil uji Hausman disajikan secara lengkap dalam tabel berikut:

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Pool: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	20.572812	2	0.0000

Sumber: BPS (data olahan eviews 7)

## 2. Pengujian Asumsi Klasik

### a. Uji Heteroskedasitas

Untuk melihat apakah terdapat heteroskedastisitas dalam model akan digunakan *white test*. Adapun kaidah keputusannya adalah sebagai berikut:

$H_0$  = residual bersifat homoskedastisitas

$H_a$  = residual bersifat heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil analisis dengan software eviews 7 diperoleh  $R^2$  sebesar 0,90 maka didapat nilai chi-square hitung sebesar 63 yang diperoleh dari informasi Obs\*R-Squared yaitu jumlah observasi dikalikan dengan koefisien determinasi, jika dibandingkan dengan nilai  $\chi^2$  kritis pada  $\alpha=5\%$  sebesar 9,49 maka  $H_0$  dapat ditolak ( $\chi^2_{hitung} > \chi^2_{kritis}$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat heteroskedastisitas dalam model. Masalah heteroskedastisitas ini dapat diatasi dengan menggunakan program dalam eviews 7 dengan memilih *cross section weight*.

b. Uji Autokorelasi (Otokorelasi)

Pengujian asumsi autokorelasi dilakukan dengan menggunakan statistik Durbin Watson (DW). Berdasarkan hasil analisis data diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 1,31. Dari tabel Durbin Watson dengan  $n = 70$  dan  $k = 2$ , maka diperoleh nilai  $d_l = 1,554$  dan  $d_u = 1,672$ . Dengan demikian nilai Durbin Watson yang dihasilkan terletak pada kaidah keputusan adanya autokorelasi positif yang dapat diatasi dengan program dalam eviews 7. Selain itu, MET tidak membutuhkan asumsi terbebasnya model dari serial korelasi maka uji autokorelasi dapat diabaikan.<sup>20</sup>

c. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas dapat dilihat dari  $R^2$  dan signifikansi dari variabel yang digunakan, jika  $R^2$  tinggi sementara banyak atau semua variabel tidak signifikan maka diduga terjadi multikolinearitas pada model.<sup>21</sup> Pada penelitian ini, hasil  $R^2$  sebesar 93,82% dan semua variabel signifikan sehingga model ini dapat dianggap terbebas dari multikolinearitas. Selain itu, penelitian ini menggunakan data panel, yaitu kombinasi antara data *time series* dengan data *cross section*, sehingga secara teknis dapat dikatakan persoalan multikolinearitas relatif dapat diatasi karena multikolinearitas biasanya terjadi pada estimasi yang menggunakan data runtut waktu (*time series*).

3. Pengujian Kriteria Statistik

Ringkasan hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut:

Variabel	Koefisien	t-statistik	Probability	Kesimpulan
----------	-----------	-------------	-------------	------------

<sup>20</sup> Noachrowi D Nachrowi dan Hardius Usman, *Pendekatan ...*, 330.

<sup>21</sup> Gujarati (2003) lihat dalam Amin Pujiati, "Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal", *Jurnal Ekonomi Pembangunan Kajian Ekonomi Negara Berkembang* (t.tp, t.th), 61-70.

C	66.62509	177.7242	0.0000	Signifikan
PERTUMBUHAN?	0.292642	4.143502	0.0001	Signifikan
BELANJAMODAL?	5.04E-12	3.094103	0.0031	Signifikan
R-squared	0,938223			
F-statistik	54,67367			
Prob (F-statistik)	0,000000			

Sumber: BPS (data olahan eviews 7)

#### 4. Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Berdasarkan hasil analisis pengaruh kemampuan keuangan dan posisi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi diperoleh nilai koefisien determinasi atau R<sup>2</sup> sebesar 0,938223. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan belanja modal telah memberikan kontribusi sebesar 93,82 persen dalam mempengaruhi IPM kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Sedangkan sisanya sebesar 6,18 persen dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.

#### 5. Uji F atau Pengujian secara Simultan

Hasil analisa data menunjukkan bahwa nilai F<sub>hitung</sub> yang diperoleh adalah sebesar 54,67 dengan probabilitas sebesar 0,000. Jika dibandingkan dengan  $\alpha=5\%$ , maka nilai probabilitas yang diperoleh lebih kecil dari  $\alpha$  yang ditetapkan ( $0,000 < 0,05$ ). Dengan demikian H<sub>0</sub> ditolak, maka variabel pertumbuhan ekonomi dan belanja modal secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap IPM kabupaten/kota di Kalimantan Barat.

#### 6. Uji t atau Pengujian secara Parsial

Hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dengan nilai t<sub>hitung</sub> sebesar 4,144 dengan probabilitas sebesar 0,000 ( $0,000 < 0,05$ ) maka H<sub>0</sub> dapat ditolak sehingga pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap IPM. Nilai koefisien sebesar 0,293 menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memiliki arah hubungan positif dan signifikan terhadap IPM.

Variabel belanja modal dengan nilai t<sub>hitung</sub> sebesar 3,094 dan probabilitas sebesar 0,003 jika dibandingkan dengan  $\alpha=5\%$ , ( $0,003 < 0,05$ ) maka H<sub>0</sub> dapat ditolak sehingga belanja modal berpengaruh secara signifikan terhadap IPM. Nilai koefisien sebesar 5,04E-12 menunjukkan bahwa variabel belanja

modal di kabupaten/kota di Kalimantan Barat memiliki arah yang positif dan signifikan terhadap IPM.

### **Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal terhadap IPM**

Persamaan model yang didapat dari estimasi pengaruh kemampuan keuangan daerah dan posisi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut:  
 $Y=66,625 + 0,293 X_1 + 5,04E-12 X_2$

Persamaan tersebut dapat diinterpretasikan jika pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 10 persen maka akan menyebabkan IPM naik sebesar 2,93 satuan. Sedangkan jika belanja modal meningkat sebesar 10 persen maka akan menyebabkan IPM naik sebesar 5,04E-11.

Pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pertumbuhan output perkapita sehingga daya beli juga akan meningkat yang akhirnya akan menyebabkan kesejahteraan meningkat. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan dari suatu negara atau daerah. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan peningkatan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat, semakin banyak yang diproduksi maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Namun yang perlu diingat adalah pertumbuhan yang tinggi tidak selalu menjamin bahwa kesejahteraan masyarakat juga akan tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang baik adalah pertumbuhan yang disertai dengan distribusi pendapatan agar tidak terjadi kesenjangan sosial. Sebagaimana tertuang dalam Qs. Al-Has r(59) 7 berikut ini:

(٧)... كَي لَا يَكُون دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ...

Artinya:

...supaya harta jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...<sup>22</sup>

Pertumbuhan ekonomi juga sebaiknya diiringi dengan pembangunan ekonomi. Pembangunan menurut Todaro merupakan suatu proses perbaikan kualitas segenap bidang kehidupan manusia yang meliputi tiga aspek penting, salah satunya adalah peningkatan standar hidup setiap orang (pendapatan, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan dan lain-lain) melalui proses pertumbuhan

---

<sup>22</sup> Qs. al-Has r (59) : 7

ekonomi yang relevan.<sup>23</sup> Pemerintah Indonesia menggunakan istilah pembangunan ekonomi sebagai serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, distribusi pendapatan yang merata, meningkatnya hubungan ekonomi regional dan mengusahakan pergeseran struktur ekonomi yang lebih tinggi (dari sektor pertanian ke sektor industri).<sup>24</sup>

Pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan atau aktivitas ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup/kemakmuran dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi juga mencakup pengertian proses perubahan yang terjadi terus menerus, usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita, kenaikan pendapatan perkapita harus terus berlangsung dalam jangka panjang serta perbaikan sistem kelembagaan.<sup>25</sup>

Pembangunan ekonomi Islam bersifat dinamik menurut dimensi ruang dan waktu karena Islam adalah *rahmatan lil 'ālamīn* sehingga penelitian dan pengembangan harus dilaksanakan sebagai agenda ekonomi Islam yang strategis dan relevan. Peran masyarakat dalam implementasi pembangunan bersifat religi sangat penting yaitu dalam menerjemahkan konsep ini pada kehidupan ekonomi global yang nyata untuk menyelamatkan manusia dan alam semesta.<sup>26</sup>

Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan menunjukkan bahwa pemerintah merealisasikan belanja modal untuk kebutuhan barang publik seperti pada bidang pendidikan dan kesehatan sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumiyati menjelaskan bahwa belanja modal mempunyai kesamaan dengan belanja pembangunan yaitu pengeluaran untuk pembiayaan proyek-proyek pembangunan seperti pembangunan SD, pusat kesehatan (puskesmas), penyertaan modal pemerintah di perusahaan-perusahaan dan pengeluaran pembangunan melalui inpres pasar, inpres jalan dan inpres reboisasi.<sup>27</sup>

Dalam era otonomi, pemerintah daerah harus semakin mendekatkan diri pada berbagai pelayanan dasar masyarakat. Oleh karena itu, alokasi belanja modal

---

<sup>23</sup> Todaro (1997) dalam Ai Siti Farida, *Sistem Ekonomi Indonesia*, Cetakan ke 1 (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2011), 90.

<sup>24</sup> Ai Siti Farida, *Sistem Ekonomi Indonesia*, Cetakan ke 1 (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2011), 76.

<sup>25</sup> Subandi. *Ekonomi ...*, 9.

<sup>26</sup> Yunus Handoko, "Pembangunan Ekonomi Berbasis Religi", *Jurnal JIBEKA*, Volume 8, No.2 (t.tp, Agustus 2014), 63-68.

<sup>27</sup>Euis Eti Sumiyati,"Pengaruh Belanja Modal Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Propinsi Jawa Barat",Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Achmad Yani (Bandung, t.th)

memegang peranan penting guna peningkatan pelayanan ini. Sejalan dengan peningkatan pelayanan ini (yang ditunjukkan dengan peningkatan belanja modal) diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang diharapkan.<sup>28</sup> Inti dari tujuan distribusi dari pengeluaran publik antara lain mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang berpihak pada kaum miskin/marginal, membantu mereka yang terpinggirkan/tertinggal dalam proses pertumbuhan ekonomi dan membantu mengatasi masalah kerentanan (*vulnerability*).<sup>29</sup>

Peran pemerintah dalam menyikapi kebutuhan masyarakat juga ditemukan dalam hadis berikut ini:

قَالَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةٍ لِمُعَاوِيَةَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ إِمَامٍ يُغْلِقُ بَابَهُ دُونَ ذَوِي الْحَاجَةِ وَالْخَلَّةِ وَالْمَسْكِنَةِ إِلَّا أَغْلَقَ اللَّهُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ دُونَ خَلَّتِهِ وَحَاجَّتِهِ وَمَسْكِنَتِهِ

Artinya:

Setiap pemimpin yang menutup pintunya terhadap orang yang memiliki hajat, pengaduan, dan kemiskinan maka Allah akan menutup pintu langit terhadap segala pengaduan, hajat dan kemiskinannya. (HR. Abu Dāwud).<sup>30</sup>

Pada tahun 2012 di Kalimantan Barat, terjadi perkembangan prasarana di bidang pendidikan, jumlah SD meningkat sebanyak 183 unit. Untuk tingkat SLTP jumlah bertambah menjadi 1.151 unit atau meningkat 6,38 persen. Untuk jenjang pendidikan menengah umum (SMU), jumlah sekolah mengalami penurunan menjadi 333 unit. Jenjang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) jumlah sekolah mengalami peningkatan dari 156 menjadi 158. Sarana kesehatan yang tidak kalah penting adalah Puskesmas yang tercatat sebanyak 237 unit, Puskesmas Pembantu 872 unit dan Puskesmas Keliling sebanyak 228 unit. Sedangkan jumlah Rumah Sakit sebanyak 39 unit, dengan jumlah tempat tidur yang tersedia sebanyak 4.783 unit.<sup>31</sup> Dengan diadakannya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, diharapkan masyarakat juga dapat menikmati manfaat dari pembangunan daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

---

<sup>28</sup> Mardiasmo dalam Fhino Andrea Christy dan Priyo Hari Adi, "Hubungan ....", 9.

<sup>29</sup> Nurul Huda dkk, *Keuangan ....*, 16-17.

<sup>30</sup> Abu Dāwud Sulaiman bin al-Asy'as as-Sijistāni Abu Dāwud, *Sunan Abu Dāwud*, Juz 9 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996), 67.

<sup>31</sup> Lihat dalam BPS, Kalimantan Barat dalam Angka 2013

## Kesimpulan

Pertumbuhan ekonomi dan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Pertumbuhan ekonomi sebaiknya diiringi dengan pemerataan agar tidak hanya sebagian golongan saja yang sejahtera. Anggaran belanja modal sebaiknya diperuntukkan untuk bidang-bidang yang penting bagi masyarakat seperti bidang pendidikan dan kesehatan serta untuk penciptaan lapangan kerja sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.

## Daftar Pustaka

- Abu Dāwud, Abu Dāwud Sulaiman bin al-Asy'as as-Sijistāni, *Sunan Abu Dāwud*, Juz 9 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1416 H/1996 M).
- Badan Pusat Statistik, *Kalimantan Barat dalam Angka 2008-2014*.  
\_\_\_\_\_. *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2008-2013*.
- Christy, Rhino Andrea dan Priyo Hari Adi. 2009. "Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia", dalam The 3rd National Conference UKWMS 2009. [14 Januari 2012, 13:13].
- Farida, Ai Siti, *Sistem Ekonomi Indonesia*, Cetakan ke 1. (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2011).
- Handoko, Yunus, "Pembangunan Ekonomi Berbasis Religi", *Jurnal JIBEK* Vol.8, No.2, Agustus 2014, hal 63-68. [1 Maret 2016, 19.14].
- Hendarmin, "Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat", dalam *Jurnal EKSOS* Volume 8, Nomor 3, Oktober 2011, hal 144-145. Fakultas Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi UNTAN. Pontianak. [2 Januari 2015, 21.32].
- Huda, Nurul dkk, *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).
- Juanda, Bambang, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Edisi Kedua. (Bandung: IPB Press, 2009).
- Karim, Adiwarman A, *Ekonomi Makro Islami*, Edisi 1. Cetakan 3. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Mirza, Denni Sulistio. 2012. "Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2009", dalam *Economics Development Analysis Jurnal* 1 (1) (2012) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. [11 Desember 2014, 06.10].

- Nachrowi, Noachrowi D dan Hardius Usman, *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006).
- Pujiati, Amin, "Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal", dalam *Jurnal Ekonomi Pembangunan Kajian Ekonomi Negara Berkembang*, halaman 61-70.(t.tp).[13 Januari 2012, 08:30].
- Pratowo, Nur Isa.(t.th). "Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia", dalam *Jurnal Studi Ekonomi Indonesia Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret*. Surakarta.[11 Desember 2014,06.22].
- Samuelson, Paul A dan William D, Nordhaus, *Makroekonomi*, Edisi 14, (t.tp: Erlangga, t.t).
- Santoso, Purbayu Budi dan Retno Puji Rahayu, 2005. "Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kediri", dalam *Dinamika Pembangunan*, Vol.2, No.1, Hal.9-18. [25 Desember 2011, 00:52].
- Soegiarto, Eddy dan Mardiyono, *Pengantar Teori Ekonomi: Ekonomi Mikro Ekonomi Makro*. Cetakan Pertama, (Tangerang: Mahkota Ilmu, 2011).
- Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, Cetakan Ketiga (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Subiyanto, Ibnu, *Metodologi Penelitian*, Edisi Ketiga, Cetakan Kedua. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2000).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan ke-14. (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Sumiyati, Euis Eti, "Pengaruh Belanja Modal Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di Propinsi Jawa Barat", Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Achmad Yani. Bandung.[2 Januari 2015,09.31].
- Suratman, Eddy dan Wahyudi, 2009. *Teknik Analisis Perencanaan Pembangunan*, Cetakan 1. (Pontianak: Untan Press, 2009).
- Widarjono, Agus, *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*, Edisi Ketiga, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Ekonisia, 2009).